

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris pada Desa Renda Kecamatan Satarmese Utara
Kabupaten Manggarai)**

Marselina Lengot¹

Email: marselinalengot@gmail.com

Rika Puspita Sari,SE,MA²

Email : rika.puspita@unitomo.aci.id

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat pengelola dana desa di Desa Renda, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai. Dalam penelitian ini, responden yang dipilih sebanyak 35 orang dari sampel berikut: kepala desa, sekretaris desa, kepala keuangan (bendahara desa), kepala tata usaha, kepala perencanaan, bagian pemerintahan, bagian kesejahteraan, bagian pelayanan, dusun Ledang, dusun Lukup, tenaga honorer, dan tokoh masyarakat. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Pendekatan analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga faktor transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berdampak pada pengelolaan dana desa secara bersamaan. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the influence of transparency, accountability, and community participation on village fund management. The population of this study was the entire community managing village funds in Renda Village, North Satarmese District, Manggarai Regency. In this study, 35 respondents were selected from the following samples: village head, village secretary, head of finance (village treasurer), head of administration, head of planning, government department, welfare department, service department, Ledang hamlet, Lukup hamlet, honorary workers, and community leaders. This study used a questionnaire to collect data. The multiple linear regression analysis approach was used to test the hypothesis. The results showed that the three factors of transparency, accountability, and community participation simultaneously impacted the management of village funds. Transparency had a significant effect on the management of village funds, while accountability had a significant effect on the management of village funds. Community participation had no effect on the management of village funds.

Keywords: transparency, accountability, community participation and village fund management

I. LATAR BELAKANG

Desa adalah wilayah dengan kepadatan penduduk terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia dan telah dihuni sejak zaman dahulu. Pembentukan desa bermula dari aktivitas kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh sifat sosial manusia, kondisi alam, lingkungan sekitar serta kepentingan bersama (Ningsih dkk.,2020).

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72, Alokasi dana desa merupakan penyediaan dana minimal sebesar 10% dari dana perimbangan yang

diterima oleh pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sebelum pengalokasian dan perhitungan berdasarkan jumlah desa, penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kondisi geografis yang sulit (Moh Khoerul Umam, 2023). Penggunaan dana desa difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan dan kebudayaan serta pengembangan usaha ekonomi produktif; seperti pasar desa, lumbung desa, produksi pupuk dan peternakan. Selain itu dana desa juga diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas termasuk bagi kelompok tani dan nelayan (Moh Khoerul Umam, 2023).

Transparansi adalah konsep di mana publik memiliki hak untuk mengakses informasi yang sesuai, dapat dipercaya, dan tidak diskriminatif tentang struktur organisasi, sambil tetap melindungi rahasia pribadi, kelompok, dan negara (Marta et al., 2021). Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah desa melakukan sesuai dengan persyaratan hukum serta etika yang relevan, serta misi masyarakat. Penelitian oleh Fahisa & Afriyenti (2023) menerangkan bahwa transparansi mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian oleh Fivi Afivah (2023), menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Salah satu asas tata kelola pemerintahan yang baik yang saat ini sedang dikaji adalah akuntabilitas. Dengan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, relevan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku umum, pemerintah daerah bertujuan untuk mencapai akuntabilitas. Menurut pengertian akuntabilitas, yang menyatakan bahwa semua operasi akhir harus dilaporkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, pemerintah desa harus melaksanakan tugasnya (BPKP, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dan pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh alokasi dana desa. Menurut penelitian Nurfitri (2023), pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh akuntabilitas. Namun menurut penelitian Nor Hasanah (2020), akuntabilitas tidak banyak berpengaruh terhadap bagaimana dana desa digunakan.

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Berpartisipasi dalam pemilihan setiap program pembangunan hanyalah salah satu aspek dari keterlibatan masyarakat; aspek lainnya adalah mengenali isu dan peluang dalam masyarakat. Menurut penelitian Fahisa & Afriyenti (2023), keterlibatan masyarakat meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Menurut Fivi Afivah (2023), pengelolaan pendapatan desa tidak terpengaruh oleh keterlibatan masyarakat.

Dana desa merupakan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota untuk mendorong pengembangan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan di desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan disalurkan kepada desa melalui APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dengan maksud untuk membantu pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 selanjutnya menyempurnakan peraturan ini. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan dana desa meliputi siklus perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang berkesinambungan.

Tujuan dana desa sebagai salah satu bentuk desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, pengelolaan Dana Desa sering kali menghadapi sejumlah kendala, terutama yang berkaitan dengan

akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat. Kasus yang terjadi di Desa Renda, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 menggambarkan problematika ini dengan jelas.

Kasus tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa dengan implementasinya di lapangan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, sebagaimana diatur dalam Permendes No.8 Tahun 2022, tidak terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari pernyataan warga Dusun Ledang yang mengaku tidak mengetahui informasi mengenai proyek dan anggarannya.

Tujuan penelitian ini Menganalisa serta mengujikan kontribusi Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dengan simultan dengan Pengelolaan Dana Desa

II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory atau teori agensi adalah bidang yang populer akhir-akhir ini. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan merupakan tempat atau intersection point bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Teori ini bercerita tentang monitoring berbagai macam biaya dan memaksakan hubungan diantara berbagai kelompok. Teori agensi merupakan suatu arah yang baru tentang keagenan. Korporasi adalah tempat atau titik persimpangan dari banyak hubungan jenis sesuai kontrak yang ada antar manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah Mikael Edowai (2021:7).

Teori Agensi merupakan konsep yang menggambarkan hubungan kontraktual antara *participal* dan agen. Dalam hubungan ini agen diberikan wewenang untuk bertindak mewakili serta berada di bawah pengawasan *participal*. *Participal* adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada agen untuk menjalankan tugas tertentu atas namanya sekaligus memiliki hak dalam pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap tindakan agen. Teori ini sangat relevan dalam menjelaskan hubungan antara *participal* dan agen khususnya dalam konteks pengelolaan dana desa.

Teori keagenan berfungsi sebagai landasan prosedur pengelolaan keuangan sektor publik. Teori keagenan menjelaskan interaksi antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal (Rijal et al., 2021). Sebagai agen, pemerintah desa bertugas mengawasi penyaluran dana desa mulai dari tahap perencanaan hingga produk akhir. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama proses pembangunan desa, pemerintah desa harus mengelola keuangan desa secara efektif dan strategis. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa harus membangun akuntabilitas yang jelas, terbuka, dan transparan (Nugroho et al. 2022).

2. *Good Governance*

Penerapan manajemen pembangunan yang dapat diandalkan, akuntabel, dan konsisten dengan asas-asas pasar yang demokratis dan efisien, menghindari kesalahan alokasi dana investasi, mencegah korupsi administratif dan politik, menjaga disiplin anggaran, dan membangun kerangka hukum dan politik untuk perluasan operasi bisnis merupakan contoh tata kelola yang baik. Pada hakikatnya istilah “pemerintahan yang baik” mengacu pada proses mencapai pilihan dan melaksanakannya dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan bersama. Sebagai konsensus yang dibuat oleh sektor publik, swasta, dan pemerintah mengenai pengelolaan pemerintahan suatu negara Edowai, Mikael (2021:12).

Namun, mengingat evolusi Reformasi yang telah berlangsung selama 15 tahun, penerapan *Good Governance* yang dilakukan Indonesia tidak mungkin sepenuhnya berhasil menyelaraskan dengan prinsip-prinsip Reformasi sebelumnya. Dua keluaran

utama dari tata kelola yang baik, yaitu akuntansi dan pengelolaan anggaran, terus diganggu oleh banyak penipuan dan kebocoran. Permasalahan paling signifikan yang dihadapi manajemen administrasi publik saat ini adalah tata kelola yang baik. Selain dampak globalisasi, besarnya harapan masyarakat terhadap pemerintah untuk menerapkan manajemen pemerintahan yang baik juga sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Edowai, Mikael (2021:14)

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan yang teratur dan disusun oleh suatu badan untuk menggambarkan kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas dalam suatu periode. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan adalah sesuatu yang sangat penting dalam pelaporan keuangan yang menyediakan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan untuk digunakan oleh pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan (IAI, 2020).

Laporan keuangan merupakan dokumen yang memberikan informasi keuangan suatu badan pada suatu periode tertentu, yang digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas. Kesimpulannya laporan keuangan merupakan catatan atau dokumen yang bertujuan untuk mencatat dan menyajikan informasi.

4. Laporan Keuangan Dana Desa

Keuangan desa didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai hak dan kewajiban setiap masyarakat yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini mencakup sumber daya material dan finansial yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab dan hak tersebut, yang dapat bermuara pada pendanaan, pengeluaran, penerimaan, dan pengelolaan keuangan desa. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berharga kepada para pengguna tentang arus kas, situasi keuangan, dan kinerja keuangan suatu entitas sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang tepat. (PSAK) Esti Handayani, A., & Aulia, Y. (2020). Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada asas-asas berikut: akuntabilitas, transparansi, keterlibatan, ketertiban, dan disiplin anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan perencanaan, penerapan, penggunaan, laporan, serta tanggung jawab terhadap keuangan desa.

5. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi beberapa tahapan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan, hingga pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa.

Menurut beberapa pendapat, sistem keuangan desa yang diatur dalam APBDes dan pengelolaan dana desa harus dipadukan (Sugiharti & Hariani, 2021). Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang menjabarkan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan disiplin anggaran disebut sebagai “pengelolaan dana desa yang baik”. Lebih lanjut, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dana desa termasuk dalam pengelolaan dana desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 2. Menjaga stabilitas dan transparansi dalam penerapan ketentuan anggaran sangat penting dalam konteks keuangan daerah. Pengelolaan dana desa harus berlandaskan pada nilai-nilai transparansi, efektivitas, efisiensi, ketertiban, keekonomisan, dan pertanggungjawaban karena perangkat desa dituntut untuk

melaksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam kapasitasnya sebagai pengelola keuangan.

6. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas bersumber dari kata akuntabilitas dimaknai tanggung jawab, kondisi yang bisa dipertanggungjawabkan, atau diminta bertanggung jawab. Tanggung jawab secara umum didefinisikan sebagai tugas orang yang bertugas mengawasi sumber daya publik dan mereka yang terlibat dalam operasi untuk dapat menanggapi pertanyaan tentang tanggung jawab mereka. Instrumen untuk kegiatan pengendalian terkait erat dengan akuntabilitas, khususnya untuk memperoleh hasil dalam layanan publik serta mengomunikasikannya secara terbuka kepada publik sebagai bagian dari proses akuntabilitas dan respons. Horri, M., dan Ganggur, M. P. (2022).

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban ataupun suatu kondisi guna dipertanggungjawabkan serta kondisi untuk dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas yakni berfungsinya semua komponen penggerak berjalannya aktivitas perusahaan, selaras wewenang serta tugasnya. Berdasarkan segi akuntansi, akuntabilitas merupakan kegiatan dalam memunculkan pengungkapan yang tepat, Klara, C. M., Aulia, Y., Handayani, A. E., & Nurhayati (2024).

Menurut Siregar dkk. (2019), akuntabilitas merupakan kewajiban orang yang memberikan amanah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang memberikan amanah memiliki kewenangan dan hak untuk menuntut pemegang amanah untuk menyampaikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

7. Transparansi

Menurut konsep pemerintahan, transparansi merupakan asas yang menjamin kebebasan atau kemampuan setiap orang untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaan, serta hasil yang dicapai. Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah transparansi. Edowai, Mikael (2021:29)

Prinsip keterbukaan yang dikenal dengan transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui sebanyak-banyaknya tentang keuangan daerah. Pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan menjaga transparansi, sesuai dengan teori keagenan dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki fleksibilitas atau kemampuan untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta hasil yang dicapai untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dalam pemerintahan desa, Labangu, Y. L., Anto, L. O., & Nurhayati (2022).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat luas mengetahui keuangan daerah selengkap-lengkapnyanya. Tujuan transparansi adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan kemampuan untuk memahami penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan, pembuatan, pelaksanaan, dan hasil-hasilnya.

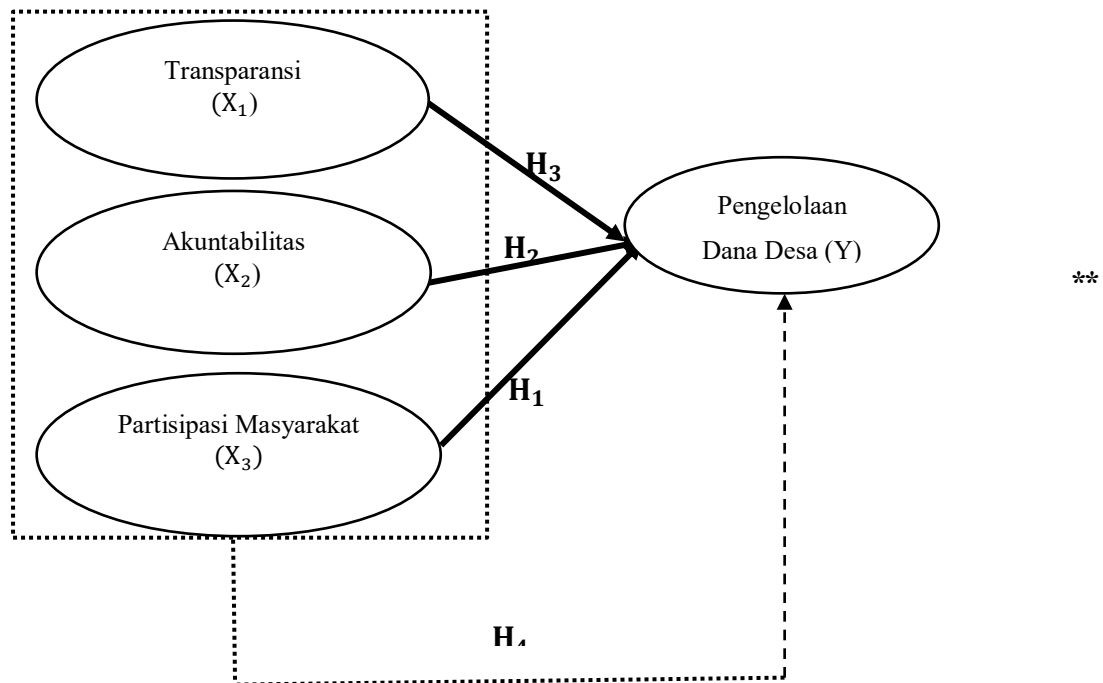
8. Partisipasi Masyarakat

Sesuai dengan prinsip partisipasi, masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan program, mulai dari perancangan dan pelaksanaan hingga sosialisasi dan pelestarian kegiatan, dengan menyumbangkan tenaga, gagasan, atau materi nyata (PTO PNPM PPK, 2007). Kontribusi individu atau kelompok terhadap proses

pembangunan, baik melalui kegiatan maupun ekspresi, juga dianggap sebagai bentuk partisipasi.

Keterlibatan masyarakat dalam operasional pemerintahan mempengaruhi penilaian dan pelacakan kinerja pemerintah serta menurunkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, menurut Putra dan Rasmini (2019). Keterlibatan masyarakat dapat menjadi alat pengecekan kinerja pemerintahan desa dan menurunkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks pengelolaan keuangan desa.

Berikut merupakan gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini.



Sumber: diolah peneliti

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

B. HIPOTESIS

H₁: Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa

H₂ : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa

H₃: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa

H₄: Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa

III. METODE PENELITIAN

3.1. Identifikasi Variabel dan Pengukurannya

1. Identifikasi Variabel

a. Variabel Dependen (Y)

Sugiyono (2020) mendefinisikan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh keberadaan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa.

b. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2020), variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, mengakibatkan, atau muncul pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi merupakan variabel independen.

2. Pengukuran

Skala Likert lima poin digunakan dalam pengukuran untuk mengukur sikap, keyakinan, dan persepsi responden terhadap suatu fenomena. Untuk memudahkan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup di mana partisipan diminta untuk memilih seberapa setuju atau tidak setuju mereka dengan komentar yang diberikan oleh Sugiyono (2021).

No	Kategori Jawaban	Skor/Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.2. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono, (2020) merujuk pada suatu kelompok yang mencakup objek atau subjek dengan karakteristik dan jumlah tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan disimpulkan. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud mencakup seluruh masyarakat yang berperan dalam pengelolaan dana desa di Desa Renda, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan jumlah dan atribut yang dimiliki oleh suatu populasi dan dianggap dapat mewakili populasi tersebut, menurut Sugiyono (2020). Dalam penelitian ini, digunakan strategi pengambilan sampel jenuh, yaitu setiap anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel penelitian ini meliputi perwakilan dari dusun Ledang dan Lukup, tenaga honorer, dan tokoh masyarakat, serta kepala desa, sekretaris desa, kepala keuangan (bendahara desa), kepala tata usaha, kepala perencanaan, kepala pemerintahan, kepala kesejahteraan, dan kepala dinas. Total responden dalam penelitian ini sebanyak 35 orang.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data kuantitatif, atau data yang dapat diukur atau dinyatakan dalam angka, digunakan dalam penelitian ini. Metode statistik biasanya digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Data primer, atau informasi yang dikumpulkan langsung dari peserta atau responden penelitian, berfungsi sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2020). Melalui survei berbasis kuesioner, data primer ini dikumpulkan langsung dari masyarakat yang mengawasi dana desa di Desa Renda, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020), ada empat metode pengumpulan data: dokumentasi, survei, wawancara, dan observasi. Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan menggunakan kuesioner. Kuesioner disebar dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden mengenai suatu permasalahan tanpa memperdulikan tanggapannya. Afivah Fivi, 2023. Responden diminta mengisi

kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Pada skala Likert 1 sampai 5, mereka dapat memilih jawaban mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuisisioner secara tertutup.

Kuisisioner memuat karakteristik responden yang digunakan untuk mengkategorikan responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan jabatan. Jumlah sampel 35 orang yang terdiri dari responden yang berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 21 orang dengan persentase 37,5% serta responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 14 orang dengan persentase 25%. Dengan demikian jumlah responden paling banyak dalam penelitian ini yaitu responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 37,5%. jumlah responden dalam penelitian ini 35 orang, yang berusia 20-30 tahun berjumlah 22 orang dengan persentase 39,3%, usia 31-40 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 8,9%, usia 41-50 berjumlah 2 orang dengan persentase 3,6%, dan yang berusia 51-60 berjumlah 6 orang dengan persentase 10,7%. Dengan demikian responden terbanyak dalam penelitian ini yaitu responden yang berusia 20-30 tahun dengan persentase 39,3%. frekuensi jabatan berikut ini sama yaitu: 35 atau 35% dari keseluruhan: Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Kasi Tata Usaha dan Umum, Kasi Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Dusun Ledang, Dusun Lukup, Tokoh Masyarakat, dan Honorer.

A. ANALIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Dengan menerapkan statistik deskriptif, analisis statistik deskriptif menghasilkan nilai mean, maksimum, minimum dan standar deviasi yang memberikan gambaran mengenai variabel sehingga memudahkan pemahaman dalam konteks yang lebih luas.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	35	20.00	25.00	22.6857	1.7110
Akuntabilitas	35	20.00	25.00	23.0857	1.8047
Partisipasi Masyarakat	35	24.00	30.00	27.7714	1.8484
Pengelolaan Dana Desa	35	21.00	25.00	23.2000	1.7286
Valid N (listwise)	35				

Sumber: hasil olah data spss versi 26

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas dapat dinyatakan bahwa variabel Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Pengelolaan Dana Desa memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,344). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pernyataan telah terbukti valid.

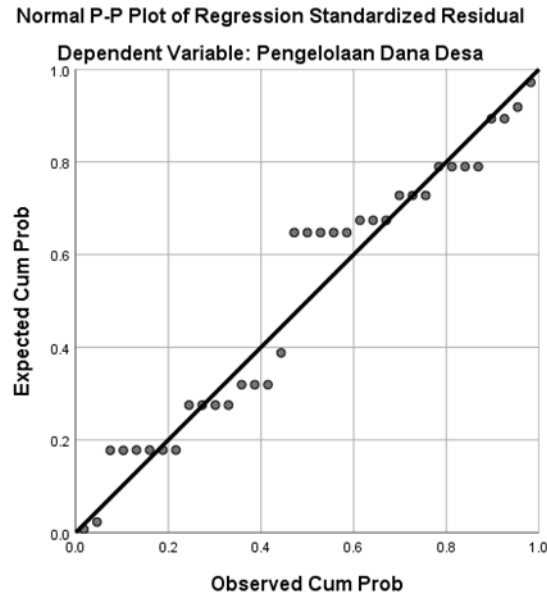
b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan Akuntabilitas memiliki nilai sebesar 0,790 lebih dari 0,60 nilai *cronbach alpha*, Partisipasi

Masyarakat memiliki nilai sebesar 0,754 *cronbach alpha*, Transparansi memiliki nilai sebesar 0,736 *cronbach alpha*, dan Pengelolaan Dana Desa memiliki nilai sebesar 0,775 *cronbach alpha*. Dengan demikian, pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini terbukti reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Sumber : hasil olah data spss versi 26

Gambar menunjukkan bahwa penyebaran data berada disekitar garis diagonal yang mengindikasikan bahwa asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi. Hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S) disajikan dalam tabel berikut ini

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		35	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.45656206	
Most Extreme Differences	Absolute	.197	
	Positive	.117	
	Negative	-.197	
Test Statistic		.197	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.118 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.110
		Upper Bound	.127

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Tabel menunjukkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Peneliti menggunakan strategi yang berbeda, yaitu metode Monte Carlo, karena hasil Asymp. Sig. 2-tailed tidak terdistribusi normal dan statistik Kolmogorov-Smirnov adalah 0,0001. Data penelitian yang tersisa terdistribusi normal, menurut hasil uji normalitas menggunakan model sig 2-tailed Monte Carlo, yang hasilnya adalah $0,118 > 0,05$.

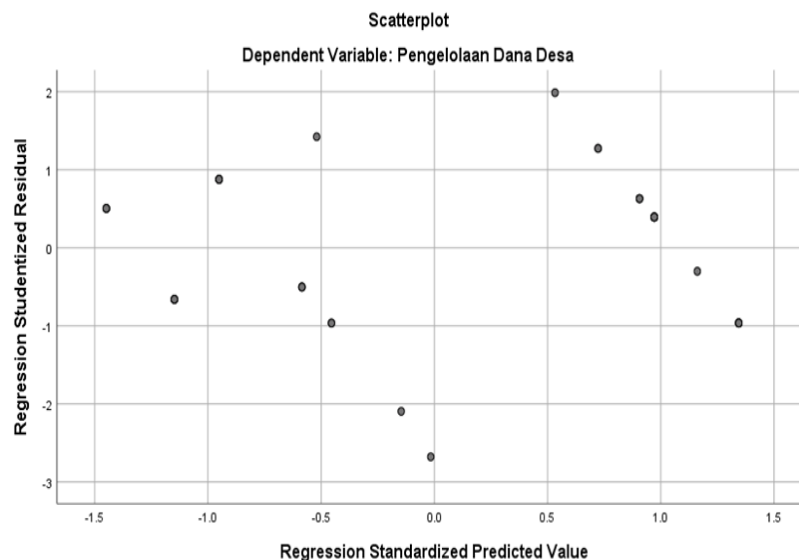
b. Uji Multikolinearitas

multikolinearitas adalah untuk memastikan apakah variabel independen dalam model regresi berkorelasi. Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai toleransi digunakan dalam pengujian ini. Dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dengan data jika VIF kurang dari 10 dan toleransi lebih besar dari 0,10.

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.088	1.240		.071	.944		
	Transparansi	.731	.087	.723	8.408	.000	.304	3.289
	Akuntabilitas	.414	.093	.432	4.463	.000	.240	4.163
	Partisipasi Masyarakat	-.109	.117	-.116	-.926	.362	.143	7.003

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi untuk setiap variabel lebih besar dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi persyaratan untuk analisis regresi dan tidak mengalami masalah multikolinearitas.



c. Uji Heterokedasitas

Gambar menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, serta terdistribusi di atas dan dibawah nol pada sumbu Y. Hal ini mengindikasi tidak adanya heterokedisitas sehingga model regresi dapat digunakan. Selain itu hasil uji heterokedisitas berdasarkan uji glejer dapat dilihat pada tabel berikut

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.316	.617		.511	.613
Transparansi	.060	.043	.433	1.388	.175
Akuntabilitas	-.034	.046	-.261	-.743	.463
Partisipasi Masyarakat	-.018	.058	-.141	-.309	.759

a. Dependent Variable: ABS_RES

Seluruh nilai signifikansi dalam penelitian ini menunjukkan angka diatas 0,05 sebagaimana hasil uji glejer. Variabel independen dalam penelitian ini mencakup Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedisitas dalam model regresi.

4. Analisis Regresi Linear berganda

Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, penelitian ini mengevaluasi partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Ketiga faktor tersebut saling terkait satu sama lain.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	.088	1.240		.071	.944
Transparansi	.731	.087	.723	8.408	.000

Akuntabilitas	.414	.093	.432	4.463	.000
Partisipasi Masyarakat	-.109	.117	-.116	-.926	.362

Berdasarkan tabel model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah $Y = 0,088 + 0,731X_1 + 0,414X_2 - 109X_3 + \epsilon$

Maka dapat dijelaskan dari persamaan diatas bahwa:

1. Pengelolaan Dana Desa (Y) bernilai 0,088 karena nilai konstanta (α) sebesar 0,088 menandakan bahwa variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3) semuanya bernilai nol.
 2. Berdasarkan koefisien regresi Transparansi (X1) sebesar 0,731, pengelolaan dana desa akan turun sebesar 0,731 untuk setiap kenaikan satu satuan variabel Transparansi.
 3. Pengelolaan dana desa akan turun sebesar 0,414 jika variabel Akuntabilitas naik satu satuan, berdasarkan koefisien regresi Akuntabilitas (X2) sebesar 0,414.
 4. Pengelolaan Dana Desa turun sebesar -109 jika variabel keterlibatan masyarakat naik satu satuan, berdasarkan koefisien regresi Keterlibatan Masyarakat (X3) sebesar -109.
5. **Uji Hipotesis (t)**

Dalam penelitian ini, hubungan antara variabel independen dan dependen diuji menggunakan model regresi berganda. Uji statistik t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi (α) untuk uji ini ditetapkan sebesar 0,05. Hasil uji statistik t dalam penelitian ini secara keseluruhan disajikan dalam bentuk tabel, yaitu:

variabel	Thitung	signifikan	Keterangan
Transparansi	14,171	0,000	H ₁ diterima
Akuntabilitas	8,662	0,000	H ₂ diterima
Partisipasi Masyarakat	9,749	0,000	H ₃ diterima

Berdasarkan tabel maka uji t dapat dijelaskan sebagai berikut

- a. Diketahui t tabel sebesar 1,695, sedangkan t hitung variabel transparansi sebesar 14,171. Hal ini dibuktikan dengan t hitung > t tabel. Variabel transparansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini mendukung H1. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat mendapat manfaat dari keterbukaan dalam pengelolaan uang desa. Putri dkk. (2021).
- b. Nilai t tabel sebesar 1,695 dan nilai t tabel variabel Akuntabilitas sebesar 8,662. Dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa karena nilai t tabel lebih besar dari nilai t tabel. Selanjutnya, hipotesis H2 dalam penelitian ini terdukung karena nilai signifikansi variabel tersebut sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.
- c. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yupita & Juita (2020) yang menemukan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi anggaran

desa berpengaruh baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Nilai t hitung variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 9,749 dan t tabel sebesar 1,695. Dapat disimpulkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Selanjutnya, hipotesis H3 dalam penelitian ini tervalidasi karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini sesuai dengan penelitian Putri dkk. (2021) yang menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap partisipasi pengelolaan dana desa.

6. Uji Kebaikan Model

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	94.513	3	31.504	137.801	.000 ^b
Residual	7.087	31	.229		
Total	101.600	34			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas

Tingkat signifikansinya adalah 0,000 atau kurang dari 0,05, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.12. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tepat karena unsur-unsur seperti akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa memengaruhi pengelolaan dana desa.

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Kemampuan model regresi dalam menjelaskan perubahan variabel dependen dievaluasi menggunakan Koefisien Determinasi R². Nilai R² yang

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.964 ^a	.930	.923	.47814

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas

rendah menunjukkan bahwa variabel independen hanya dapat menjelaskan perubahan kecil pada variabel dependen. Nilai R² adalah angka antara 0 dan 1.

Nilai Adjusted R² sebesar 0,923 atau 92,3%, berdasarkan tabel 4.13. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pengelolaan dana desa dapat dijelaskan sebesar 92,3% oleh variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan

Partisipasi Masyarakat. Faktor lain di luar cakupan model penelitian ini, seperti kecakapan pendamping desa setempat dan kompetensi wakil pemerintah desa, memberikan pengaruh terhadap sisanya sebesar 7,7% (100%–92,3%).

B. PEMBUKTIAN HIPOTESIS

a. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Renda, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Moudina Fahisa dan Mayar Afriyenti (2023), yang juga menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam pengelolaan dana desa.

b. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Temuan analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Renda, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Made Yoda & Ni Ketut Rasmini (2019) yang menemukan bahwa pengelolaan dana desa lebih baik jika dilakukan melalui transparansi. Sebaliknya, penelitian Andreani Avellyni L. & Nur Handayani tahun 2021 menunjukkan bahwa transparansi tidak memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dana desa.

c. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Di Desa Renda, Kecamatan Satar Mese Utara, Kabupaten Manggarai, hasil analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan simpulan penelitian Andreani Avellyni L. & Nur Handayani (2021) yang juga menemukan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan pengelolaan anggaran desa.

d. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Sedikit orang yang berpartisipasi dalam proses tata kelola, pengelolaan dana desa tidak terpengaruh oleh kurangnya partisipasi masyarakat. Alasan lain yang berkontribusi adalah tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam penilaian dan umpan balik pengelolaan dana desa. Karena masyarakat lebih mampu memahami kebutuhan mereka sendiri, setiap program pemerintah harus dimulai dari sana.

Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan Aprilya & Astri (2020) dan Ayem & Enti (2022), yang tidak menemukan hubungan antara pengelolaan dana desa dan keterlibatan masyarakat. Efektivitas pengelolaan keuangan desa juga cenderung rendah ketika partisipasi masyarakat minimal.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi mempengaruhi pengelolaan anggaran desa. Penulis menarik kesimpulan bahwa, jika diambil secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut membantu meningkatkan pengelolaan dana desa untuk mendorong pembangunan desa.

1. Pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh transparansi. Keterbukaan dan aksesibilitas terhadap data keuangan dan non-keuangan, yang disediakan pemerintah desa kepada publik, merupakan contoh transparansi. Masyarakat, sebagai pemangku kepentingan (pelaku), lebih percaya kepada pemerintah desa sebagai pelaksana (agen) ketika ada transparansi yang lebih besar.
2. Akuntabilitas juga penting bagi pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa yang secara efektif menerapkan prinsip akuntabilitas menunjukkan bahwa mereka mematuhi hukum dan dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah federal atas setiap keputusan yang mereka ambil. Pelaporan keuangan yang andal dari tingkat akuntabilitas yang tinggi akan membantu efisiensi administrator desa dalam mengawasi keuangan daerah.
3. Pengelolaan dana desa tidak terlalu dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses tata kelola, serta ketidakmampuan mereka dalam memberikan masukan atau menilai pengelolaan dana desa. Karena masyarakat lebih memahami apa yang dibutuhkan di lingkungannya, setiap program pemerintah harus dimulai dari kebutuhan mereka.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan sebagai berikut: Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya, untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti kompetensi aparatur desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa yang mungkin mempengaruhi pengelolaan dana desa sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiraya & Sayidah. (2018). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS DAN Prodi Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr Soetomo Surabaya Horri dan Esti , Pengaruh Kecerdasan Emosional Pages 99 Horri dan Esti , Pengaruh Kecerdasan Emosional ... *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(September).
- Agustiana, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gunungbatu. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Vol.1*, 1–20. <https://Journal.Stiepasim.Ac.Id/Index.Php/JMA/Article/Download/113/100>
- AFIVAH, FIVI, And Ade Setiawan. *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kabupaten Karanganyar)*. Diss. UIN Surakarta, 2023.
- Anggeli, F. S., & Andajani. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 25(2), 117–132.
- Aryani, Ni Putu Dessy Eka, Dr. Desak Nym Sri Werastuti, And I Made Pradana Adiputra. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)* 11(2): 178–90.
- Aulia, Y., Sofian, N., & Esti, A. (2024). The Effect of Good Governance on Preventing Potential Fraud in the Management of BOK Funds at Puskesmas in Mojokerto District. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 393–413. <https://doi.org/10.23887/jia.v9i1.68443>
- Dhini, F. H. (2021). *Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance (Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Kebonsari)*. 1–146. [Http://Eprints.Umpo.Ac.Id/6589/](http://Eprints.Umpo.Ac.Id/6589/)
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. In *Pascasarjana Universitas Bosowa* (Vol. 5, Issue 3). https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/773/12.BUKU_AKUNTABILITAS_DAN_TRANSPARANSI_PENGELOLAAN_KEUANGAN....pdf?sequence=1 Vol, J. P. (2025). *1 2 12. 10(1)*, 105–121.
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris Pada Nagari Di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 745–757. <https://doi.org/10.24036/Jea.V5i2.694>
- Fitriyani, L. Y., Marita, Windyastuti, & Absor, M. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Lima Desa Di Kecamatan Kedawan, Kabupateen Bojonegoro). *Eksos*, 2(2), 132–139.
- Hasanah, Nor. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa."
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar

Akuntansi Keuangan.

- Irawan, F., Kusumastuti, R., & Maulana Zulma, G. W. (2022). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 753–761. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1954>
- Klara, Aulia, Handayani dan Nurhayati. (2024). Moderasi Akuntabilitas Pada Pengaruh Pengendalian Akuntansi Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus Pada Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas Tuban). *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* Kumalasari, D. (N.D.). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.*
- Kurniawan, P. A. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)[Phd Thesis]. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Labangu, Y. L., Anto, L. O., & Nurhayati. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 7(2), 223–235
- Nawi, R., Studi, P., Ilmu, M., & Pancasakti, U. (2022). *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SATAR RUWUK ACCOUNTABILIT FOR MANAGEMENT OF FUNDS IN THE VILLAGE OF RUWUK Rusdin N. 6*, 54–68.
- Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Se- Kecamatan Sambi Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 51–59. <https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.8>
- Marhaendra Ihza Pahlevi , Endah Susilowati, Astrini Aning Widoretno. 2022. “Marhaendra Ihza Pahlevi Dkk.” :*Journal Of Economic, Business And Accounting* Volume 6 N(2597–5234): PENGARUH, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI.
- Maria Priyanti Ganggur, & Miftahol Horri. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 (Studi di Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat). *Soetomo Accounting Review*, 2(4), 534–549. <https://doi.org/10.25139/sacr.v2i4.8559>
- (Moh Khoerul Umam, 2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Kebijakan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat.
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

- JAP: Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 23(01). [Http://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jap](http://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jap)
- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya*, 6(2), 1794–1805. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V6i2.1181>
- Nurul Arifin, Afrah Junita, & Nasrul Kahfi. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 49–63. <https://doi.org/10.55606/Optimal.V4i1.2585>
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan Di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517–3532. Retrieved From <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/30>
- Nurul Arifin, Afrah Junita, And Nasrul Kahfi. 2023. “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.” *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 4(1): 49–63. [Doi:10.55606/Optimal.V4i1.2585](https://doi.org/10.55606/Optimal.V4i1.2585).
- Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si.,Dkk.2019 Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Smp Negeri 1 Tanjungbalai
- Oktavia, N. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. *Skripsi*.
- Pebrianti. (2021). *TINJAUAN PUSTAKA Adapun Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Masalah Pada Pembahasan Diatas Yang Tertuang Dalam Tabel Di Bawah Ini Dan Sekaligus Sebagai Bahan Referensi Di Mana Untuk Digunakan Sebagai Pengembangan Penelitian Untuk Dapat Dilakukan O*. 10–45.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Putu Dessy Eka Aryani, N., Nym Sri Werastuti, D., & Made Pradana Adiputra, I. (2020). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DESA, EFEKTIVITAS KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT TERHADAP PENGOPTIMALAN PENGELOLAAN DANA DESA. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 11, Issue 2).
- RISTIANA. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintahan Desa Sidokare, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang). *Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2022*, 52, 4220126.
- Pratiwi, A. D. (2020). "Peran Transparansi Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah." *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(2), 123-135.
- Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 3301–3313. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.V31.I12.P20>

- Setyawati, E. S. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang)*.
- Sari, I. S., & Susanto, H. (2020). *Akuntansi Dasar* (3rd Ed.). Salemba Empat.
- Siska Br. Hutabarat, And Ratna Sari Dewi. 2022. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1(3): 261–68. Doi:10.56799/Peshum.V1i3.423.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supriati, Dwi. *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.
- Tahirah, Tahirah. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Di Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang*. Diss. IAIN PAREPARE, 2023.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://Medium.Com/@Arifwicaksanaa/Pengertian-Use-Case-A7e576e1b6bf>
- Zulfan Saputra. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar